

Analysis of Regional Original Income (PAD) Realization to Measure the Level of Regional Financial Independence in Bandung City in 2022-2024

Dela Anjelina^{1*)}, Gurhanawan²⁾, Alya Nur Kamila³⁾, Aliya Nazifa⁴⁾,
Chika Putri Ramadani⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

^{*)}Correspondence Author: 63230833@bsi.ac.id, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v7i1.3526>

Abstract

This study aims to analyze the realization of Locally Generated Revenue (PAD) to measure the level of regional financial independence in Bandung City for 2022–2024. This study uses a quantitative descriptive approach with secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance. Data analysis techniques used include the PAD growth ratio, effectiveness ratio, contribution ratio, and regional financial independence ratio. The results show that Bandung City's PAD growth fluctuated in 2023 and increased in 2024. The PAD effectiveness level during the study period remains in the less effective category because revenue realization has not reached the established target. Regional taxes are the largest contributor to PAD, while regional levies experienced a significant increase in 2024 following the implementation of the HKPD Law. Furthermore, the regional financial independence ratio is high, indicating that Bandung City has a sufficient capacity to finance regional needs through local revenue. Therefore, optimization of PAD management is necessary to strengthen regional financial independence in a sustainable manner.

Keywords: Local Original Income, Effectiveness, Contribution, Regional Financial Independence, Bandung City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi rasio pertumbuhan PAD, rasio efektivitas, rasio kontribusi, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Bandung mengalami fluktuasi pada tahun 2023 dan peningkatan pada tahun 2024. Tingkat efektivitas PAD selama periode penelitian masih berada pada kategori kurang efektif karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pajak daerah menjadi komponen penyumbang terbesar terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 setelah diterapkannya kebijakan Undang-Undang HKPD. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kategori tinggi, yang menandakan bahwa Kota Bandung memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai kebutuhan daerah melalui pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan PAD agar mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Kemandirian Keuangan Daerah, Kota Bandung

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan. Kewenangan tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kondisi dan ciri khas masing-masing daerah. Wewenang tersebut juga memerlukan kemampuan manajemen yang baik, karena tanpa memerlukan manajemen yang baik, potensi yang dimiliki tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, keberadaan PAD memiliki peran yang penting dalam menilai kondisi dan kesehatan keuangan suatu daerah (Putri et al., 2024). Pendapatan Asli Daerah juga berkaitan erat dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya nilai PAD belum tentu selalu mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Penilaian terhadap PAD tidak hanya melihat dari jumlah yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan tingkat pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi perbedaan antara target dan realisasi PAD. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan angka, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi sebagaimana mestinya kinerja pengelolaan keuangan secara lebih komprehensif. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal juga berdampak terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut. Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kota Bandung sebagai salah satu kota besar yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor perdagangan,

jasa, dan pariwisata. Namun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada beberapa periode masih mengalami fluktuasi dan belum sepeuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD masih perlu dioptimalkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh karena itu, keberadaan PAD tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Nurhabibah et al., 2022). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah pada satu periode anggaran, dan penerimaan berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Irene et al., 2025) Realisasi PAD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan menjalankan program pemerintah, serta menjadi sebagai alat evaluasi pemerintah daerah untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, tingkat efektivitas dapat dilihat melalui perbandingan antara realisasi penerimaan daerah dengan target penerimaan yang telah direncanakan sebelumnya (Magdalena Y. Devinci et al., 2023). Dalam konteks keuangan daerah, kontribusi pajak daerah dapat dipahami sebagai besarnya peran atau sumbangan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi persentase kontribusi yang dihasilkan, maka semakin besar pula peran pajak daerah dalam membentuk PAD (Heriyanto & Rioni, 2025).

Selain itu, kontribusi PAD juga dapat dianalisis berdasarkan masing-masing komponennya, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Menurut (Martaviona & Nurhalimah, 2025) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu. Retribusi lebih spesifik karena dipungut sebagai bentuk penggantian atas biaya penyediaan jasa atau fasilitas (Suprpto & Purbowati, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh penerimaan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, serta pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik, dan dalam pelaksanaannya mengandalkan sumber pendapatan daerah, yaitu PAD. Menurut (Vol et al., 2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, karena semakin tinggi PAD yang daerah tersebut peroleh, akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Tyas & Kristiyanti, 2025) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik dan menjadi komponen utama dalam struktur PAD, sedangkan kontribusi retribusi daerah masih cenderung rendah. Penelitian lain oleh (Harsono, 2025) menyatakan bahwa efektivitas PAD yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah karena masih adanya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, penelitian (Afrilia et al., 2025) menunjukkan bahwa tingginya kontribusi PAD dapat mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai efektivitas, kontribusi, dan kemandirian keuangan daerah, namun penelitian ini berfokus pada analisis realisasi PAD Kota Bandung tahun 2022-2024 berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengamatan tentang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2022-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi PAD, serta memahami peran PAD untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau laporan yang telah dipublikasi oleh instansi terkait yang berfokus pada analisis dokumen tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode non-interaktif. Data diperoleh melalui dokumen resmi serta berbagai literatur yang relevan dalam topik penelitian. Menurut Sugiyono (2019) Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu (Asri & Ningrum, 2024). Menurut Nazir 2014, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nurharirah & Effane, 2022). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan rasio pertumbuhan PAD, rasio efektivitas, rasio kontribusi, dan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PAD dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} : \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_t : Realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{t-1} : Realisasi PAD tahun sebelumnya

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan.

$$\text{Rumus Efektivitas : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Kriteria	Presentase Keefektifan
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi 2019:141(Hikmah et al., 2023)

3. Rasio Kontribusi Komponen PAD

Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap total PAD.

$$\text{Kontribusi Komponen PAD : } \frac{\text{Komponen PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Kriteria	Presentase
Sangat Kurang	0,00%-10%
Kurang	10,10%-20%
Sedang	20,10%-30%
Cukup Baik	30,10%-440%
Baik	40,10%-50%
Sangat Baik	Di atas 50%

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 (Rohmah, 2024)

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan daerah sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Kemandirian : } \frac{\text{PAD}}{\text{Total Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Halim 2001(Hardiana, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2022-2024

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022–2024, dilakukan analisis terhadap realisasi PAD dan tingkat pertumbuhan PAD setiap tahunnya. Analisis pertumbuhan digunakan untuk melihat perubahan penerimaan PAD dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui kondisi perkembangan pendapatan daerah Kota Bandung.

Tabel 4. Data Pertumbuhan dan Realisasi PAD

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan
2022	2,754,477,948,218	
2023	2,677,743,298,886	-2.79%
2024	3,091,256,996,423	15.44%

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 2,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nala & Fatimah, 2026) yang menyatakan bahwa perkembangan PAD dapat mengalami penurunan akibat belum optimalnya pengelolaan PAD dan adanya perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi PAD. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi PAD mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,44%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah Kota Bandung dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tyas & Kristiyanti, 2025) yang menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

(Afrilia et al., 2025) yang menunjukkan bahwa perkembangan PAD cenderung stabil dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya dengan perbedaan yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, potensi sumber pendapatan daerah, dan kebijakan pengelolaan PAD di masing-masing daerah. Secara umum, perkembangan PAD Kota Bandung selama tahun 2022–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Peningkatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bandung masih memiliki potensi yang cukup baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan optimalisasi pengelolaan PAD agar penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan dan mampu mendukung kemandirian keuangan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan rasio efektivitas yang membandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan. Semakin tinggi presentase yang diperoleh, maka semakin efektif kinerja pengelolaan pendapatan daerah tersebut. Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Bandung tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Data Efektivitas PAD

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	Efektivitas %	Kriteria
2022	3,165,808,943,749	2,754,477,948,218	87.01%	Kurang Efektif
2023	3,211,761,339,322	2,677,743,298,886	83.37%	Kurang Efektif
2024	3,449,126,791,482	3,091,256,996,423	89.62%	Kurang Efektif

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel yang menunjukkan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa efektivitas PAD masih termasuk dalam kategori yang kurang efektif. Pada tahun 2022, presentase efektivitas PAD mencapai 87.01%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh pemerintah daerah belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nala & Fatimah, 2026) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD dapat berada pada kategori kurang efektif apabila realisasi PAD belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, tingkat efektivitas PAD turun menjadi 83.37%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD terhadap target yang telah ditetapkan mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh, masih kurangnya pengelolaan yang optimal terhadap sumber penerimaan daerah, situasi ekonomi yang belum membaik, serta ketidakstabilan kontribusi dari beberapa komponen PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Trisnasari & Sunanningsih, 2022) yang menyatakan bahwa kontribusi beberapa sumber PAD masih cenderung fluktuatif, dan hal tersebut memengaruhi pencapaian target PAD.

Selanjutnya pada tahun 2024 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali meningkat menjadi 89.62%. Meskipun masih berada pada kategori kurang efektif, peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkn tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu meningkatkan pendapatan daerah meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tyas & Kristiyanti, 2025) yang menunjukkan realisasi PAD meskipun target penerimaan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Harsono, 2025) dan (Ardiansyah, 2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD berada di kategori sangat efektif karena realisasi PAD mampu melampaui target yang ditetapkan. Secara umum, perkembangan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dalam periode 2022-2024 menunjukkan situasi yang cenderung berfluktuatif. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahun masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi kriteria efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar penerimaan daerah dapat dicapai secara maksimal dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah. Adapun hasil perhitungan kontribusi pajak daerah tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD
2022	2,138,902,003,211	2,754,477,948,218	77.65%
2023	2,113,840,365,382	2,677,743,298,886	78.94%
2024	2,398,963,730,198	3,091,256,996,423	77.60%

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan PAD. Pada tahun 2022, pendapatan pajak daerah berhasil mencapai 77.65% terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan daerah masih berasal dari sektor pajak daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nugroho & Witono, 2026) yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama dalam PAD yang memiliki kontribusi paling besar. Pada tahun 2023, kontribusi pajak daerah meningkat mencapai 78.94%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi sumber pendapatan terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Havi et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi dominan terhadap PAD meskipun beberapa jenis pajak mengalami penurunan di periode tertentu.

Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi pajak daerah meningkat menjadi Rp 2.39 triliun dengan tingkat kontribusi mencapai 77.60%. Meskipun terdapat penurunan sedikit dibanding dengan tahun 2023, pajak daerah masih menjadi komponen utama dalam struktur PAD Kota Bandung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harsono, 2025) yang menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD dan memperkuat struktur PAD. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian (Trisnasari & Sunanningsih, 2022) yang menunjukkan bahwa kontribusi beberapa sumber PAD belum mampu mendukung peningkatan PAD. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berperan penting dalam memperkuat PAD Kota Bandung seama periode 2022-

2024. Tingginya kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan masih sangat bergantung pada sector perpajakan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan pengelolaan pajak daerah secara optimal agar PAD dapat bertambah dan mampu memperkuat keamndirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adapun hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD
2022	30,927,337,733	2,754,477,948,218	1.12%
2023	35,086,571,388	2,677,743,298,886	1.31%
2024	548,625,386,829	3,091,256,996,423	17.75%

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah pada tahun 2022-2023 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan komponen PAD lainnya. Pada tahun 2022 kontribusi retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung mncapai 1.12%. Setelah itu, pada tahun 2023 kontribusunya mengalami sedikit peningkatan menjadi 1.31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dari sector retribusi daerah belum menjadi sumber utama yang mengambil peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini sealan dengan penelitian (Trisnasari & Sunanningsih, 2022) yang menyatakan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih tergolong kecil dibandingkan pajak. Namun, pada tahun 2024, kontribusi retribusi meningkat secara signifikan mencapai 17.75%. Peningkatan tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam penerimaan retribusi daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mulai diberlakukan secara luas pada tahun 2024. Kebijakan tersebut menciptakan perubahan pengelolaan pajak dan retribusi

daera. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harsono, 2025) yang menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui kebijakan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Afrilia et al., 2025) yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah yang bisa terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

3. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) maupun entitas lainnya. Adapun kontribusi hasil kekayaan yang dipisahkan Kota Bandung tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Kontribusi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD
2022	15,231,517,616	2,754,477,948,218	0.55%
2023	4,235,910,008	2,677,743,298,886	0.16%
2024	16,105,401,199	3,091,256,996,423	0.52%

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa komponen tersebut masih termasuk kategori sangat rendah. Pada tahun 2022, kontribusi pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 0.55% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan blum berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afrilia et al., 2025) yang menyatakan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih tergolong rendah dibanding komponen lainnya. Pada

tahun 2023, kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan turun menjadi 0.16%, penurunan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh penurunan laba atau pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengelolaan aset daerah lainnya yang menjadi sumber pemasukan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harsono, 2025) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disebabkan oleh belum optimalnya kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya, pada tahun 2024, kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan kembali meningkat menjadi 0.52% kontribusi ini masih cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kota Bandung masih lebih banyak dipengaruhi oleh komponen lain. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ardiansyah, 2023) yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD dan aset daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap peningkatan PAD daerah. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bandung selama periode 2022-2024 masih belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih efektif dalam mengelola aset serta perusahaan daerahnya agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen pendapatan yang mencakup berbagai penerimaan di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rincian kontribusi lain-lain PAD yang sah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun	Lain - lain PAD yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD
2022	569,417,089,658	2,754,477,948,218	20.67%
2023	524,580,452,108	2,677,743,298,886	19.59%
2024	127,562,478,197	3,091,256,996,423	4.13%

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022-2024, dapat diketahui bahwa komponen tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2022, kontribusi lain-lain PAD yang sah mencapai 20.67% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Setelah itu, pada tahun 2023 kontribusinya mengalami penurunan kecil sehingga mencapai 19.59%. hal ini menunjukkan bahwa komponen ini masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan setelah pajak daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nala & Fatimah, 2026) yang menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah masih memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur PAD daerah selain pajak daerah. Namun, pada tahun 2024, kontribusi lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 4.13%. penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) secara lebih luas mulai tahun 2024. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harsono, 2025) yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat memengaruhi struktur dan klasifikasi sumber-sumber PAD. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ardiansyah, 2023) yang menunjukkan bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup besar terhadap kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022-2024. Meskipun pada awal masa penelitian komponen tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan, pada tahun 2024 kontribusinya mengalami penurunan akibat adanya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus melakukan peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara seimbang agar penerimaan daerah tetap stabil dan dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian keuangan daerah Kota Bandung, dilakukan analisis terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan daerah sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun 2022–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Tabel Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2022	2,754,477,948,218	2,575,338,252,042	106.96%
2023	2,677,743,298,886	2,563,635,795,182	104.45%
2024	3,091,256,996,423	2,942,184,122,932	105.07%

Sumber : Peneliti 2026

Berdasarkan tabel di atas, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun 2022–2024 menunjukkan hasil yang relatif tinggi dan stabil. Pada tahun 2022, rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 106,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung lebih besar dibandingkan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri tergolong baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afrilia et al., 2025) yang menyatakan bahwa tingginya rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui PAD tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2023, rasio kemandirian mengalami sedikit penurunan menjadi 104,45%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung masih berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harsono, 2025) yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi PAD, daerah dengan kontribusi PAD yang tinggi tetap mampu mempertahankan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kategori baik. Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio kemandirian kembali meningkat menjadi 105,07%.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nala & Fatimah, 2026) yang menunjukkan bahwa beberapa daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat meskipun PAD mengalami peningkatan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur APBD, potensi ekonomi daerah, serta kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah. Secara umum, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandung selama tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai kebutuhan daerah melalui pendapatan daerah sendiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2022–2024, maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022–2024 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2023 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 2,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 realisasi PAD kembali mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,44%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kota Bandung masih mengalami perubahan dari tahun ke tahun, meskipun Kota Bandung tetap memiliki potensi penerimaan. Tingkat efektivitas PAD masih berada pada kategori kurang efektif karena realisasi belum mencapai target anggaran. Kontribusi komponen, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah mulai meningkat pada tahun 2024 setelah adanya kebijakan UU HKPD, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah masih rendah. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun 2022–2024 menunjukkan kategori yang tinggi karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari rasio kemandirian yang berada di atas 100% setiap tahunnya, sehingga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2022–2024, maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi pemerintah daerah, pemerintah kota Bandung diharapkan dapat terus meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, khususnya pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah agar target PAD dapat tercapai secara maksimal serta mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas penerimaan daerah, serta peran PAD dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, khususnya pada Pemerintah kota Bandung. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan periode penelitian yang lebih panjang, menggunakan variabel lain yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, serta melakukan perbandingan dengan daerah lain agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih luas dan mendalam.

REFERENSI

- Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Ardiansyah, R. (2023). *Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Riyans Ardiansyah Universitas Borneo Tarakan , Indonesia 1 . PENDAHULUAN Undang-undang no . 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa daerah diberik*. 4(1), 92–106.
- Asri, M., & Ningrum, S. (2024). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten wonogiri*. 2(1), 182–190.
- Hardiana. (2023). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*. 8(2).
- Harsono, I. (2025). *Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023*. 6(3), 349–360.
- Havi, P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak*

- daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. 5(2), 411–419.
- Heriyanto, G., & Rioni, Y. S. (2025). *Economics and Digital Business Review Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan*. 7(1), 347–356.
- Hikmah, A. A., Murdiyanto, E., & Rahmawati, Z. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021*. 1(4).
- Irene, X., Landjang, S., Asli, P., & Kunci, K. (2025). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga* 171. 8(1), 171–180.
- Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, & Magdalena Silawati Samosir. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51–70.
<https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.44>
- Martaviona, J., & Nurhalimah, S. (2025). *Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal*. 3(1), 265–277.
- Nala, M., & Fatimah, S. (2026). *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7, No. 2, September 2025*. 7(2), 38–45.
- Nugroho, A., & Witono, B. (2026). *AND CITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE*. 9, 1305–1324.
- Nurhabibah, A., Boedirochminarni, A., & Sari, Primita, N. (2022). *Pengaruh PAD dan Angkatan Kerja Terhadap IPM Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019*. 6(1), 26–40.
- Nurharirah, S., & Effane, A. (2022). *Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. 1, 219–225.
- Putri, A. A., Siboro, S. F., & Safitri, E. (2024). *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang*. 2(3), 64–74.
- Rohmah, T. S. (2024). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung*. 9(1), 137–156.
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). *Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil*

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2(1), 1–8.

Trisnasari, R., & Sunanningsih, S. (2022). *Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan. 5(1), 18–28.*
<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>

Tyas, N. W., & Kristiyanti, L. M. S. (2025). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah : Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo Sitasi Artikel : 4(1), 684–690.*